

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). *Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal*. Jakarta: BPKP.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2022). *Pedoman Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI Modul Pelaporan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Itwasum Polri. (2022). *Laporan Evaluasi Pengawasan Internal Polri Tahun 2022*. Jakarta: Divisi Pengawasan Polri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Polda DIY. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran dan IKPA Tahun Anggaran 2023*. Yogyakarta: Bidkeu Polda DIY.
- Suwanda, D. (2019). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan publik*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 150–162.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Polri.